

B.12

RENCANA AKSI BELA NEGARA

**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. RENCANA AKSI NASIONAL BELA NEGARA;	3
BAB II RENCANA AKSI BELA NEGARA	4
BAB III PENUTUP	5
LAMPIRAN-LAMPIRAN	6
<i>Tabel 1 Rencana Aksi Bela Negara Lingkup Ditjen GAKKUM KLHK TA 2019</i>	7
<i>Tabel 2 Rekapitulasi Kegiatan Rencana Aksi Bela Negara (B.04) Lingkup Ditjen PHLHK, KLHK TA 2019</i>	9
<i>Tabel 3 Rekapitulasi Kegiatan Rencana Aksi Bela Negara (B.06) Lingkup Ditjen PHLHK, KLHK TA 2019;</i>	10
<i>Tabel 4 Rekapitulasi Kegiatan Rencana Aksi Bela Negara(B.09) lingkup Ditjen PHLHK, KLHK TA 2019;</i>	11
<i>Tabel 5 Rekapitulasi Kegiatan Rencana Aksi Bela Negara (B.12) lingkup Ditjen PHLHK, KLHK TA 2019;</i>	11



KATA PENGANTAR

Selama hampir 5 tahun, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berhasil untuk hadir ditengah-tengah masyarakat dalam rangka memberikan rasa adil dari penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan secara responsif, transparan dan akuntabel sehingga telah berhasil memberikan dampak jera para pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

Namun untuk lebih mempercepat, mengefektifitas kan upaya-upaya penegakan hukum yang telah dilakukan diperlukan evaluasi atas rencana kerja yang mendukung rencana aksi bela negara dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan yang akan mendorong penegakan hukum yang tegas dan konsisten secara terus menerus serta menciptakan inovasi dan perbaikan-perbaikan dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Dengan disusunnya laporan Rencana Aksi Bela Negara ini kiranya dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait Rencana Aksi Bela Negara (B.12) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tahun 2019.

Dirjen PHLHK akan tetap menjaga komitmennya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatannya secara terencana dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Jakarta, 03 Desember 2019
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum LHK

Jasmin Ragil Utomo, SH, MH
NIP. 19640603 199203 1 001



BAB I PENDAHULUAN

A. Rencana Aksi Nasional Bela Negara;

Menindaklanjuti Inpres No.7 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019, Dewan Pertahanan Nasional memperkuat penanganan permasalahan negara, diantaranya Perubahan spektrum ancaman: SANGAT MULTIDIMENSI DAN SALING TERKAIT, Amandemen ke 2 UUD NRI 1945: Memindahkan Pasal mengenai Bela Negara dari Bab Pertahanan ke Bab Warganegara & Penduduk (PSL 27).

Arahan Bapak Presiden dalam Ratas 19 Desember 2016 dan Ratas Tanggal 26 Juli 2017. Oleh Karena itu perlu dilakukan kegiatan kegiatan untuk mendukung Pembinaan Bela Negara, Bela Negara Adalah Sikap Dan Perilaku Warga Negara Yang Dijiwai Oleh Kecintaannya Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Menjamin Kelangsungan Hidup Bangsa Dan Negara (Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Huruf A Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara); Definisi Aksi Bela Negara Adalah Sinergi Dari Perwujudan Kesadaran Segenap Elemen Masyarakat, Bangsa, Dan Negara Guna Mengatasi Segala Macam Ancaman, Gangguan, Hambatan, Dan Tantangan Dengan Berlandaskan Pada Nilai-Nilai Luhur Bangsa Untuk Mewujudkan Negara Yang Berdaulat, Adil, Dan Makmur (Setjen Wantannas). Esensi Instruksi Presiden kepada, para Menteri Kabinet Kerja; Sekretaris Kabinet; Jaksa Agung Republik Indonesia; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kepala Badan Intelijen Negara; Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; Para Gubernur; dan Para Bupati/Walikota untuk melaksanakan Aksi Nasional Bela Negara yang lebih sistematis, terstruktur, integral, terstandarisasi dan massif.



BAB II RENCANA AKSI BELA NEGARA

A	BIDANG	:	Sumber Kekayaan Alam Dan Lingkungan Hidup;
	ANCAMAN	:	Kerusakan Lingkungan Hidup yang Mengakibatkan
	FAKTUAL	:	Bencana Banjir, Longsor, Kekeringan, Wabah Penyakit dan Kemiskinan;
B	KEGIATAN	:	Gerakan Penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup
	PRIORITAS	:	pada kawasan gunung hutan, sumber mata air, sungai, waduk, danau, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pesisir dan laut;
C	KRITERIA	:	Meningkatnya Kesadaran Hukum di Masyarakat dalam
	KEBERHASILAN	:	rangka pencegahan kejahatan LHK;
D	UKURAN	:	Jumlah masyarakat yang telah tersosialisasi dengan
	KEBERHASILAN	:	peraturan terkait LHK dan tata cara pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
E	K/L	:	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
F	PROGRAM	:	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
G	KEGIATAN	:	Sosialisasi pencegahan dan pengamanan Kawasan Hutan
	SATUAN KERJA	:	dan pengaduan pencemaran dan kerusakan LH di 8
	KLHK	:	Kab/Kota Rawan Kejahatan LHK;
H	TARGET	:	
	OUTPUT	:	
	B.04	:	1.500 Orang
	LOKASI	:	di 8 Kab/Kota Rawan Kejahatan LHK
	B.06	:	900 Orang
	LOKASI	:	di 6 Kab/Kota Rawan Kejahatan LHK
	B.09	:	750 Orang
	LOKASI	:	di 6 Kab/Kota Rawan Kejahatan LHK
	B.12	:	750 Orang
	LOKASI	:	di 6 Kab/Kota Rawan Kejahatan LHK
I	OUTPUT 2019	:	3.900 Orang



BAB III PENUTUP

Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2019 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang akan dilakukan di tahun tahun berikutnya, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2019.

Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2019 ini diharapkan tercapainya optimalisasi peran dalam peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja sehingga tercapai sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran serta pengendalian kinerja yang mendukung tercapainya Rencana Aksi Bela Negara di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019, khususnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Diharapkan hasil dari pelaksanaan Rencana Aksi Bela Negara di Tahun 2019 ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat (*Awareness*) terutama meningkatnya pengaduan yang masuk dari Masyarakat, dan tinggi nya atensi publik terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik di Lingkungan Masyarakat itu sendiri, di Media Lokal serta dan dukungan tingginya atensi masyarakat baik di media Mainstream maupun di Media Sosial.

Dengan demikian, Rencana Kerja Bela Negara Tahun 2019 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Direktorat Jenderal GAKKUM LHK. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya didalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Tabel 1 Rencana Aksi Bela Negara Lingkup Ditjen GAKKUM KLHK TA 2019

NO.	KEGIATAN PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	KETERANGAN
BIDANG SUMBER KEKAYAAN ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP								
1.	Gerakan Penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup pada kawasan gunung hutan, sumber mata air, sungai, waduk, danau, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pesisir dan laut.	Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Seluruh Kementerian Koordinator	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Kepolisian Negara RI (Gakkum)	Meningkatnya Kesadaran Hukum di Masyarakat dalam rangka pencegahan kejahatan LHK	Jumlah masyarakat yang telah tersosialisasi dengan peraturan terkait LHK dan tata cara pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Target B.04 Sosialisasi pencegahan dan pengamanan Kawasan Hutan dan pengaduan pencemaran dan kerusakan LH di 8 Kab/Kota Rawan Kejahatan LHK (1.500 orang)	(1915/1500) =128%	1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi 4. Dokumentas i dan laporan kegiatan
				Target B.06 Sosialisasi pencegahan dan pengamanan Kawasan Hutan dan pengaduan pencemaran dan kerusakan LH di 6 Kab/Kota Rawan Kejahatan LHK (900 orang)	(1915+727/1500+900) =110,08%	Akumulasi Target B04+B06	1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi 4. Dokumentas i dan laporan kegiatan	

Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2019

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	KETERANGAN
BIDANG SUMBER KEKAYAAN ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP								
Ancaman Faktual: Kerusakan Lingkungan Hidup yang Mengakibatkan Bencana Banjir, Longsor, Kekeringan, Wabah Penyakit dan Kemiskinan								
1.						<p>Target B.09</p> <p>Sosialisasi pencegahan dan pengamanan Kawasan Hutan dan pengaduan pencemaran dan kerusakan LH 6 Kab /Kota Rawan Kejahatan LHK (750 orang)</p>	<p>(1915+727+349 5/1500+900+750) = 6.137/3.150 = 194,,83%</p> <p>Akumulasi Target B04+B06+B09</p>	<p>1. Undangan</p> <p>2. Daftar Hadir</p> <p>3. Notulensi</p> <p>4. Dokumentasi dan laporan kegiatan</p>
					<p>Target B.12</p> <p>Sosialisasi pencegahan dan pengamanan Kawasan Hutan dan pengaduan pencemaran dan kerusakan LH 6 Kab/Kota Rawan Kejahatan LHK (750 orang)</p>	<p>(1915+727+349 5+1249/1500+900+750+750) = 7.386/3.900 = 189,,38%</p> <p>Akumulasi Target B04+B06+B09 +B12</p>	<p>1. Undangan</p> <p>2. Daftar Hadir</p> <p>3. Notulensi</p> <p>5. Dokumentasi dan laporan kegiatan</p>	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Tabel 2 Rekapitulasi Kegiatan Rencana Aksi Bela Negara (B.04) Lingkup Ditjen PHLHK, KLHK TA 2019

KEGIATAN RENCANA AKSI BELA NEGARA (B.04)		Peserta	Lokasi
Kegiatan	1	30 Orang	Bogor, Jawa Barat
Kegiatan	2	167 Orang	Bandung, Jawa Barat
Kegiatan	3	30 Orang	Cianjur, Jawa Barat
Kegiatan	4	200 Orang	Malang, Jawa Timur
Kegiatan	5	30 Orang	Sorong, Papua Barat
Kegiatan	6	28 Orang	Makkasar, Sulawesi Selatan
Kegiatan	7	190 Orang	Samarinda, Kaltim
Kegiatan	8	160 Orang	Tenggarong, Kukar
		160 Orang	Cianjur, Jawa Barat
		160 Orang	Bogor, Jawa Barat
		196 Orang	Cianjur, Jawa Barat
		205 Orang	Bogor, Jawa Barat
Kegiatan	9	209 Orang	Bandung, Jawa Barat
Kegiatan	10	120 Orang	Manado, Sulut
		1915 Orang	9 Kabupaten/Kota, 8 Provinsi



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Tabel 3 Rekapitulasi Kegiatan Rencana Aksi Bela Negara (B.06) Lingkup Ditjen PHLHK, KLHK TA 2019;

KEGIATAN RENCANA AKSI BELA NEGARA (B.06)		Peserta	Lokasi
Kegiatan 1	Ngobrol Pintar (NGOPi) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam Tema Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK (13 Mei 2019)	150 Orang	Pekanbaru, Riau
Kegiatan 2	Ngobrol Pintar (NGOPi) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam Tema Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan (13 April 2019)	180 Orang	Pekanbaru, Riau
Kegiatan 3	Sosialisasi Penegakan hukum Ditjen GAKKUM KLHK dan “Generasi Milennial Pengawas Ditjen Gakkum : 12 Orang Milennial Pengawas Sampah = Saka Kalpataru : 10 Orang Saka Wanabakti : 10 Orang	32 Orang	Rest Area 57 dan 19, Jawa Barat
Kegiatan 4	Sosialisasi dan Pembagian Souvenir “ Kendalikan Sampah Plastik “ dengan Ditjen PSLB3; Tim : 30 Orang Ditjen Gakkum + 70 Orang Ditjen PSLB3; Souvenir : (300 Tumbler + 300 Tas Guna Ulang);	300 Orang	Rest Area 57 dan 19, Jawa Barat
Kegiatan 5	Ekspose Hasil Verifikasi PPSA di BPPH LHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	40 Orang	Kupang, NTT
Kegiatan 6	Persiapan Klarifikasi hasil Verifikasi PSLH LP dengan Masyarakat (17 Mei 2019) – PT KSA	25 Orang	DKI Jakarta
	Total	727 Orang	4 Kabupaten/Kota, 4 Provinsi



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Tabel 4 Rekapitulasi Kegiatan Rencana Aksi Bela Negara(B.09) lingkup Ditjen PHLHK, KLHK TA 2019;

KEGIATAN RENCANA AKSI BELA NEGARA (B.09)			Peserta	Lokasi
Kegiatan	1	Rapat Kerja Perencanaan Kejahatan Kehutanan di Wilayah Kalimantan	76 Orang	Banjarn Baru, Kalimantan Selatan
Kegiatan	2	Sosialisasi Program Kerja Penegakan Hukum LHK di Wilayah Lampung	196 Orang	DKI Jakarta
Kegiatan	3	Sosialisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	34 Orang	Bogor
		Sosialisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	30 Orang	Gorontalo
		Sosialisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	34 Orang	Banjarmasin, Kalimantan Selatan
		Sosialisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	53 Orang	Tangerang, Jawa Barat
Kegiatan	4	Festival Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.072	DKI Jakarta
		23 Juli 2019 = 3.490 Orang 24 Juli 2019 = 2.740 Orang 25 Juli 2019 = 2.986 Orang Total : 9.216 Orang selama 3 Hari = 3,072 Orang Perhari		
TOTAL			3.495 Orang	6 Provinsi, 6 Kabupaten/Kota

Tabel 5 Rekapitulasi Kegiatan Rencana Aksi Bela Negara (B.12) lingkup Ditjen PHLHK, KLHK TA 2019;

KEGIATAN RENCANA AKSI BELA NEGARA (B.09)			Peserta	Lokasi
Kegiatan	1	Focus Group Discussion, Hotel Swarnadipa, Palembang, 16 Oktober 2019	204 Orang	Palembang, Sumatera Selatan
Kegiatan	2	Dukungan Kegiatan Pertikawan Nasional		
		a. Sub Camp Depok, Jawa Barat, 20 s.d 21 November 2019	240 Orang	Depok, Jawa Barat
		b. Sub Camp Buperta Cibubur, Jakarta Timur, 20 s.d 23 November 2019	205 Orang	Cibubur, Jakarta Timur
Kegiatan	3	Sosialisasi Peraturan Penegakan Hukum LHK terkait Tindak Pidana TSL, 23 November 2019	500 Orang	Pangkal Pinang, Bangka, Babel
Kegiatan	4	Sosialisasi Pengamanan Kawasan Hutan di Taman Nasional Gunung Merbabu	100 Orang	Boyolali, Jawa Tengah
TOTAL			1.249 Orang	5 Provinsi, 5 Kabupaten/Kota



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
2019**

GEDUNG MANGGALA WANABAKTI , BLOK IV Lt 4,
JI. GATOT SUBROTO, DKI JAKARTA 10270